

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Obyek/Subyek Penelitian

Pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan *total sampling*, dimana seluruh populasi pada penelitian ini akan dijadikan sebagai sampel. Populasi pada penelitian ini yaitu seluruh desa yang berada di Kecamatan Wadaslintang, dimana terdapat 16 desa pada Kecamatan Wadaslintang. Oleh karena itu, 16 desa tersebut menjadi sampel pada penelitian ini.

**Tabel 4.1**  
**Penyebaran Kuesioner**

No.	Nama Kantor Desa	Kuesioner disebar	Kuesioner kembali
1	Besuki	5	5
2	Erorejo	4	4
3	Gumelar	6	6
4	Kalidadap	6	6
5	Kaligowong	5	5
6	Karanganyar	9	9
7	Kumejing	7	7
8	Lancar	7	7
9	Ngalian	6	4
10	Panerusan	5	5
11	Plunjaran	10	10
12	Somogede	7	5
13	Sumberejo	6	6
14	Sumbersari	7	7
15	Tirip	3	2
16	Trimulyo	7	7
Total		101	95
Kuesioner yang dapat diolah			94
Tingkat pengembalian			94,06%

Sumber: Data primer diolah, 2018

Tabel 4.1 menunjukkan bahwa setiap desa yang dijadikan sampel penelitian diambil 3-10 responden untuk mengisi kuesioner penelitian. Total kuesioner yang disebarakan kepada responden sebanyak 101 kuesioner di seluruh desa di Kecamatan Wadaslintang dimana terdapat 16 desa, 95 kuesioner yang dapat kembali dengan tingkat pengembalian sebesar 94,06% dan 94 kuesioner yang dapat digunakan untuk diolah dalam penelitian ini.

**Tabel 4.2**  
**Data Responden**

Jumlah Sampel		Frekuensi	Persentase
Jenis Kelamin	Laki-laki	81	86,17%
	Perempuan	13	13,83%
Jumlah		94	100%
Pendidikan	SD	7	7,45%
	SMP	24	25,53%
	SMA	49	52,13%
	Diploma	1	1,06%
	S1	11	11,70%
	S2	2	2,13%
Jumlah		94	100%
Umur	<20 thn	0	0%
	20 – 35 thn	34	36,17%
	35 – 50 thn	7	7,45%
	>50 thn	53	56,38%
Jumlah		94	100%
Lama bekerja di Pemerintah Desa	<1 thn	3	3,19%
	1 – 5 thn	17	18,09%
	6 – 10 thn	30	31,91%
	>10 thn	44	46,81%
Jumlah		94	100%

Sumber: Data primer diolah, 2018

Berdasarkan Tabel 4.2 terdapat 94 responden dengan jumlah responden laki-laki sebanyak 81 dengan persentase 86,17% dari total responden dan

jumlah responden perempuan sebanyak 13 dengan persentase sebesar 1,83% dari total responden. Tingkat pendidikan dari responden untuk Sekolah Dasar (SD) sebanyak 7 responden dengan persentase sebesar 7,45%, Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebanyak 24 responden dengan persentase sebesar 25,53%, setara Sekolah Menengah Atas (SMA) sebanyak 49 responden dengan persentase sebesar 52,13%, responden dengan tingkat pendidikan Diploma sebanyak 1 responden dengan persentase sebesar 1,06%, responden dengan latar belakang pendidikan terakhir sarjana (S1) sebanyak 11 responden dengan persentase sebesar 11,70%, dan responden dengan tingkat pendidikan magister (S2) sebanyak 2 responden dengan persentase sebesar 2,13%. Informasi mengenai umur responden dengan umur <20 tahun tidak ada, responden dengan rentang umur 20-35 tahun sebanyak 34 responden dengan persentase sebesar 36,17%, responden dengan umur antara 35-50 tahun sebanyak 7 responden dengan persentase sebesar 7,45%, dan responden dengan umur >50 tahun sebanyak 53 responden dengan persentase sebesar 56,38%. Jumlah responden dengan lama bekerja di pemerintah desa <1 tahun sebanyak 3 responden dengan persentase sebesar 3,19%, 1-5 tahun bekerja di pemerintah desa sebanyak 17 responden dengan persentase sebesar 18,09%, responden dengan lama bekerja di pemerintah desa selama 6-10 tahun sebanyak 30 responden dengan persentase sebesar 31,91%, dan responden dengan lama bekerja di pemerintah desa >10 tahun sebanyak 44 responden dengan persentase sebesar 46,81%.

## B. Uji Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif memuat penjelasan mengenai data yang dapat diolah dalam penelitian dengan bentuk tabel, diagram, grafik dan lainnya untuk mempermudah dalam membuat kesimpulan data secara menyeluruh. Analisis statistik deskriptif digunakan untuk melihat gambaran mengenai nilai minimum, nilai maksimum, mean, dan *standard deviation* dari masing-masing variabel yang digunakan dalam penelitian.

**Tabel 4.3**  
**Hasil Uji Statistik Deskriptif**

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa	94	22	30	26,84	2,384
Kapasitas Aparatur Desa	94	24	35	30,54	2,439
Ketaatan Regulasi	94	27	35	31,83	2,213
Kualitas Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa	94	14	35	30,27	3,670
Pemanfaatan Teknologi Informasi	94	19	25	22,72	1,886
Komitmen Aparatur Desa	94	17	25	21,91	2,256
Pendamping Desa	94	16	25	21,44	1,943
Valid N (listwise)	94				

Sumber: Data primer diolah, 2018

Hasil uji statistik deskriptif dari masing-masing variabel dalam penelitian ini dapat diketahui melalui Tabel 4.3. Berdasarkan Tabel 4.3 hasil uji statistik deskriptif dapat diketahui terdapat 7 variabel penelitian, diantaranya kinerja pengelolaan keuangan desa, kapasitas aparatur desa, ketaatan regulasi, kualitas pengawasan badan permusyawaratan desa, pemanfaatan teknologi

informasi, komitmen aparatur desa, dan pendamping desa. Sesuai dengan Tabel 4.3 bahwa variabel kinerja pengelolaan keuangan desa dengan jumlah data sebanyak 94 memiliki nilai rata-rata 26,84 dengan nilai minimum sebesar 22, nilai maksimum sebesar 30, dan mempunyai nilai *standard deviation* sebesar 2,384. Variabel kapasitas aparatur desa dengan jumlah data sebanyak 94 memiliki nilai rata-rata 30,54 dengan nilai minimum sebesar 24, nilai maksimum sebesar 35, dan mempunyai nilai *standard deviation* sebesar 2,439. Variabel ketaatan regulasi dengan jumlah data sebanyak 94 memiliki nilai rata-rata sebesar 31,83 dengan nilai minimum sebesar 27, nilai maksimum sebesar 35, dan mempunyai nilai *standard deviation* sebesar 2,213. Variabel kualitas pengawasan BPD dengan jumlah data sebanyak 94 memiliki nilai rata-rata 30,27 dengan nilai minimum sebesar 14, nilai maksimum sebesar 35, dan mempunyai nilai *standard deviation* sebesar 3,670. Variabel pemanfaatan teknologi informasi dengan jumlah data sebanyak 94 memiliki nilai rata-rata 22,72 dengan nilai minimum sebesar 19, nilai maksimum sebesar 25, dan mempunyai nilai *standard deviation* sebesar 1,886. Variabel komitmen aparatur desa dengan jumlah data sebanyak 94 memiliki nilai rata-rata 21,91 dengan nilai minimum sebesar 17, nilai maksimum sebesar 25, dan mempunyai nilai *standard deviation* sebesar 2,256. Variabel pendamping desa dengan jumlah data sebanyak 94 memiliki nilai rata-rata 21,44 dengan nilai minimum sebesar 16, nilai maksimum sebesar 25, dan mempunyai nilai *standard deviation* sebesar 1,943.

### C. Statistik Deskriptif Variabel Dependen

Statistik deskriptif variabel dependen digunakan untuk melihat jumlah responden dan persentase jawaban untuk masing-masing pernyataan pada kuesioner sesuai dengan opsi yang tersedia pada variabel dependen. Variabel dependen pada penelitian ini adalah kinerja pengelolaan keuangan desa dan terdapat 6 pernyataan dalam kuesioner pada variabel kinerja pengelolaan keuangan desa. Data yang dapat diolah dalam penelitian ini yaitu sebanyak 94 responden.

**Tabel 4.4**  
**Statistik Deskriptif**  
**Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa**

Pernyataan (K)	SS		S		N		TS		STS	
	Res	%	Res	%	Res	%	Res	%	Res	%
K1	62	65,96	32	34,04	0	0	0	0	0	0
K2	32	34,04	59	62,77	3	3,19	0	0	0	0
K3	33	35,11	57	60,64	1	1,06	3	3,19	0	0
K4	58	61,70	35	37,24	1	1,06	0	0	0	0
K5	55	58,51	39	41,49	0	0	0	0	0	0
K6	40	42,55	52	55,32	2	2,13	0	0	0	0

Sumber: Data primer diolah, 2018

Berdasarkan Tabel 4.4 menjelaskan bahwa jumlah responden untuk pernyataan pertama yang menjawab Sangat Setuju (SS) yaitu 62 responden dengan persentase sebesar 65,96%, opsi jawaban Setuju (S) sebanyak 32 responden dengan persentase sebesar 34,04%, dan opsi jawaban Netral (N), Tidak Setuju (TS), dan Sangat Tidak Setuju (STS) tidak dipilih oleh responden. Jumlah responden untuk pernyataan kedua yang menjawab Sangat Setuju (SS) yaitu 32 responden dengan persentase sebesar 34,04%, opsi jawaban Setuju (S)

sebanyak 59 responden dengan persentase sebesar 62,77%, opsi jawaban Netral (N) sebanyak 3 responden dengan persentase sebesar 3,19%, opsi jawaban Tidak Setuju (TS) dan Sangat Tidak Setuju (STS) tidak dipilih oleh responden. Jumlah responden untuk pernyataan ketiga yang menjawab Sangat Setuju (SS) yaitu 33 responden dengan persentase sebesar 35,11%, opsi jawaban Setuju (S) sebanyak 57 responden dengan persentase sebesar 60,64%, opsi jawaban Netral (N) sebanyak 1 responden dengan persentase sebesar 1,06%, opsi jawaban Tidak Setuju (TS) sebanyak 3 responden dengan persentase sebesar 3,19% dan Sangat Tidak Setuju (STS) tidak dipilih oleh responden. Jumlah responden untuk pernyataan keempat yang menjawab Sangat Setuju (SS) yaitu 58 responden dengan persentase sebesar 61,70%, opsi jawaban Setuju (S) sebanyak 35 responden dengan persentase sebesar 37,24%, opsi jawaban Netral (N) sebanyak 1 responden dengan persentase sebesar 1,06%, opsi jawaban Tidak Setuju (TS) dan Sangat Tidak Setuju (STS) tidak dipilih oleh responden. Jumlah responden untuk pernyataan kelima yang menjawab Sangat Setuju (SS) yaitu 55 responden dengan persentase sebesar 58,51%, opsi jawaban Setuju (S) sebanyak 39 responden dengan persentase sebesar 41,49%, dan opsi jawaban Netral (N), Tidak Setuju (TS), dan Sangat Tidak Setuju (STS) tidak dipilih oleh responden. Jumlah responden untuk pernyataan keenam yang menjawab Sangat Setuju (SS) yaitu 40 responden dengan persentase sebesar 42,55%, opsi jawaban Setuju (S) sebanyak 52 responden dengan persentase sebesar 55,32%, opsi jawaban Netral (N)

sebanyak 2 responden dengan persentase sebesar 2,13%, opsi jawaban Tidak Setuju (TS) dan Sangat Tidak Setuju (STS) tidak dipilih oleh responden.

#### D. Uji Kualitas Instrumen dan Data

##### 1. Uji Validitas dan Reliabilitas.

###### a. Uji Validitas.

Validitas merupakan tingkat keandalan dan keabsahan dari sebuah alat ukur yang digunakan. Menurut sugiyono dalam Nazaruddin dan Basuki (2017) instrumen pengukur dikatakan valid apabila instrumen pengukur tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur. Disimpulkan bahwa instrumen pengukur yang valid adalah instrumen yang benar-benar tepat untuk mengukur apa yang akan diukur. Validitas data dapat dilihat dari nilai total *Bivariate Correlation Pearson r* hitung lebih besar daripada *r* tabel dan nilai signifikansi tidak lebih dari 0,05 pada program olah data SPSS versi 19.0 untuk *windows*.

**Tabel 4.5**  
**Hasil Uji Validitas**

Variabel	Item	r-hitung	Signifikansi	Keterangan
Kapasitas Aparatur Desa (KA)	KA1	0,409	0,000	Valid
	KA2	0,689	0,000	Valid
	KA3	0,732	0,000	Valid
	KA4	0,718	0,000	Valid
	KA5	0,740	0,000	Valid
	KA6	0,667	0,000	Valid
	KA7	0,646	0,000	Valid
Ketaatan Regulasi (KR)	KR1	0,514	0,000	Valid
	K2R	0,399	0,000	Valid
	KR3	0,766	0,000	Valid

Variabel	Item	r-hitung	Signifikansi	Keterangan
	KR4	0,720	0,000	Valid
	KR5	0,556	0,000	Valid
	KR6	0,692	0,000	Valid
	KR7	0,739	0,000	Valid
Kualitas Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)	BPD1	0,880	0,000	Valid
	BPD2	0,865	0,000	Valid
	BPD3	0,849	0,000	Valid
	BPD4	0,882	0,000	Valid
	BPD5	0,749	0,000	Valid
	BPD6	0,806	0,000	Valid
	BPD7	0,820	0,000	Valid
Pemanfaatan Teknologi Informasi (TI)	TI1	0,684	0,000	Valid
	TI2	0,775	0,000	Valid
	TI3	0,694	0,000	Valid
	TI4	0,848	0,000	Valid
	TI5	0,838	0,000	Valid
Komitmen Aparatur Desa (KO)	KO1	0,748	0,000	Valid
	KO2	0,753	0,000	Valid
	KO3	0,600	0,000	Valid
	KO4	0,812	0,000	Valid
	KO5	0,822	0,000	Valid
Pendamping Desa (PD)	PD1	0,683	0,000	Valid
	PD2	0,803	0,000	Valid
	PD3	0,784	0,000	Valid
	PD4	0,897	0,000	Valid
	PD5	0,698	0,000	Valid
Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa (K)	K1	0,785	0,000	Valid
	K2	0,687	0,000	Valid
	K3	0,727	0,000	Valid
	K4	0,775	0,000	Valid
	K5	0,726	0,000	Valid
	K6	0,784	0,000	Valid

Sumber: Data primer diolah, 2018

Berdasarkan Tabel 4.5 mengenai hasil uji validitas menunjukkan bahwa semua instrumen pengukur dalam bentuk pernyataan kuesioner dari masing-masing variabel penelitian

memiliki nilai *Pearson Correlation* pada  $r$  hitung  $\geq 0,25$  yang merupakan nilai dari  $t$  tabel dari 6 variabel independen dan jumlah data sebanyak 94, sehingga semua instrumen pernyataan kuesioner valid.

**b. Uji Reliabilitas.**

Uji reliabilitas dilakukan dengan melihat nilai dari *Cronbach's Alpha* pada uji statistik dalam program olah data SPSS. Menurut sugiyono (2014) menjelaskan bahwa instrumen penelitian dapat dikatakan reliabel apabila nilai dari *Cronbach's Alpha*  $\geq 0,60$ . Hasil uji reliabilitas disajikan dalam tabel berikut ini.

**Tabel 4.6**  
**Hasil Uji Reliabilitas**

Variabel	<i>Cronbach's Alpha</i>	Keterangan
Kapasitas Aparatur Desa	0,746	Reliabel
Ketaatan Regulasi	0,672	Reliabel
Kualitas Pengawasan BPD	0,918	Reliabel
Pemanfaatan Teknologi Informasi	0,827	Reliabel
Komitmen Aparatur Desa	0,784	Reliabel
Pendamping Desa	0,832	Reliabel
Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa	0,837	Reliabel

Sumber: Data primer diolah, 2018

Berdasarkan Tabel 4.6 terdapat hasil pengujian reliabilitas, dimana nilai *Cronbach's Alpha* dari semua variabel dalam penelitian ini lebih dari 0,60. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa instrumen penelitian pada setiap variabel dalam penelitian ini adalah reliabel, dengan kata lain pernyataan-pernyataan dalam

instrumen penelitian ini konsisten sehingga dapat digunakan pada penelitian lain dengan subyek yang sama.

## 2. Uji Asumsi Klasik.

### a. Uji Normalitas.

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah model regresi yang digunakan, variabel pengganggu, dan residual mempunyai distribusi normal. Telah dilakukan pengujian normalitas untuk penelitian ini dengan hasil dibawah ini.

**Tabel 4.7**  
**Hasil Uji Normalitas**

	One Klomogorov-Smirnov		
	Df	Sig.	Keterangan
<b>Unstandardized Residual</b>	1,068	0,285	Data Normal

Sumber: Data primer diolah, 2018

Hasil uji normalitas dengan uji *One Klomogorov-Smirnov* disajikan pada Tabel 4.7 menunjukkan bahwa besaran signifikansi adalah 0,285. Syarat data berdistribusi normal dengan nilai dari signifikansi lebih dari 0,05. Melihat hasil uji normalitas diatas lebih dari 0,05 dengan nilai signifikansi 0,285 dapat disimpulkan bahwa data dapat berdistribusi dengan normal dan dapat dilakukan analisis lebih lanjut menggunakan statistika parametrik.

### b. Uji Multikolinearitas.

Uji multikolinearitas digunakan untuk mengetahui apakah di dalam model regresi pada penelitian terdapat korelasi antar variabel bebas. Antar variabel penelitian dikatakan memiliki korelasi dapat dilihat melalui nilai dari *tolerance value* dan nilai *Variance Inflation Factor* (VIF). Berikut hasil uji multikolinearitas yang ditampilkan melalui tabel di bawah ini.

**Tabel 4.8**  
**Hasil Uji Multikoliniearitas**

Variabel	Colinearity Statistic		Keterangan
	Tolerance	VIF	
Kapasitas Aparatur Desa (KA)	0,381	2,627	Tidak mengalami multikolinearitas
Ketaatan Regulasi (KR)	0,316	3,162	Tidak mengalami multikolinearitas
Kualitas Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)	0,567	1,765	Tidak mengalami multikolinearitas
Pemanfaatan Teknologi Informasi (TI)	0,388	2,579	Tidak mengalami multikolinearitas
Komitmen Aparatur Desa (KO)	0,414	2,414	Tidak mengalami multikolinearitas
Pendamping Desa (PD)	0,414	2,150	Tidak mengalami multikolinearitas

Sumber: Data primer diolah, 2018

Hasil pengujian multikoliniearitas sesuai dengan Tabel 4.8 di atas menunjukkan bahwa semua variabel independen pada penelitian ini memiliki nilai VIF >10 dan nilai *tolerance* >0,10, sehingga dapat

disimpulkan bahwa tidak terdapat korelasi antar variabel independen dalam penelitian ini dan tidak mengandung multikolinieritas dalam model regresi yang digunakan.

**c. Uji Heteroskedastisitas.**

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk mengetahui apakah data penelitian yang digunakan dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dan residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Data mengalami heteroskedastisitas dapat dilihat melalui uji gletser pada program olah data SPSS yang ditentukan melalui nilai signifikansinya. Hasil uji heteroskedastisitas penelitian ini ditampilkan melalui tabel di bawah ini.

**Tabel 4.9**  
**Hasil Uji Heteroskedastisitas**

<b>Variabel</b>	<b>Sig.</b>	<b>Kesimpulan</b>
Kapasitas Aparatur Desa	0,177	Homoskedastisitas
Ketaatan Regulasi	0,970	Homoskedastisitas
Kualitas Pengawasan BPD	0,269	Homoskedastisitas
Pemanfaatan Teknologi Informasi	0,267	Homoskedastisitas
Komitmen Aparatur Desa	0,094	Homoskedastisitas
Pendamping Desa	0,068	Homoskedastisitas

Sumber: Data primer diolah, 2018

Model regresi dikatakan terbebas dari heteroskedastisitas apabila nilai signikansi dari uji gletser  $<0,05$  dan sebaliknya apabila nilai signifikansi dari uji gletser  $<0,05$  maka model regresi terkena heteroskedastisitas. Sesuai dengan Tabel 4.9 hasil uji heteroskedastisitas menunjukkan bahwa semua variabel independen

pada penelitian ini dengan model regresi yang digunakan memiliki nilai signifikansi  $<0,05$  semua, sehingga dapat disimpulkan bahwa semua variabel pada penelitian ini terbebas dari heteroskedastisitas.

## **E. Hasil Penelitian (Uji Hipotesis)**

### **1. Uji Nilai t.**

Pengujian secara parsial dari masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen merupakan cara untuk mengetahui apakah variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen. Syarat variabel independen memiliki pengaruh terhadap variabel dependen dapat dilihat dari nilai koefisien regresi searah dengan hipotesis dan nilai signifikansi pada uji t, apabila nilai signifikansi  $<0,05$  maka hipotesis tidak diterima atau tertolak. Sebaliknya, apabila nilai signifikansi dari uji t  $>0,05$  maka hipotesis diterima, dengan kata lain variabel independen secara parsial berpengaruh terhadap variabel dependen. Hasil pengujian dapat dilihat dalam tabel *Coefficients* pada sistem olah data SPSS versi 19.0.

**Tabel 4.10**  
**Hasil Penelitian (Uji Nilai t)**

<b>Hipotesis</b>	<b>B</b>	<b>Sig.</b>	<b>Kesimpulan</b>
H <sub>1</sub> : Kapasitas aparatur desa berpengaruh positif terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa.	0,211	0,007	Diterima
H <sub>2</sub> : Ketaatan regulasi berpengaruh positif terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa.	0,221	0,019	Diterima
H <sub>3</sub> : Kualitas pengawasan BPD berpengaruh positif terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa.	0,195	0,000	Diterima
H <sub>4</sub> : Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa.	0,256	0,010	Diterima
H <sub>5</sub> : Komitmen aparatur desa berpengaruh positif terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa.	-0,085	0,286	Ditolak
H <sub>6</sub> : Pendamping desa berpengaruh positif terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa.	0,337	0,000	Diterima

Sumber: Data primer diolah, 2018

**a. Pengujian Hipotesis 1.**

Berdasarkan Tabel 4.10 hasil penelitian uji t menunjukkan bahwa kapasitas aparatur desa berpengaruh secara positif terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa. Hal ini dibuktikan dengan nilai koefisien regresi (B) sebesar 0,211 atau positif sesuai dengan hipotesis dan nilai signifikansi sebesar 0,007 dimana kurang dari  $\alpha$  yaitu 0,05. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa kapasitas aparatur desa berpengaruh positif terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa. Dengan demikian hipotesis 1 diterima.

**b. Pengujian Hipotesis 2.**

Berdasarkan Tabel 4.10 hasil penelitian uji t menunjukkan bahwa ketaatan regulasi berpengaruh positif terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa. Hal ini dibuktikan dengan nilai koefisien regresi (B) sebesar 0,221 atau positif sesuai dengan hipotesis dan nilai signifikansi sebesar 0,019 dimana kurang dari  $\alpha$  yaitu 0,05. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa ketaatan regulasi berpengaruh positif terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa. Dengan demikian hipotesis 2 diterima.

**c. Pengujian Hipotesis 3.**

Berdasarkan Tabel 4.10 hasil penelitian uji t menunjukkan bahwa kualitas pengawasan badan permusyawaratan desa berpengaruh secara positif terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa. Hal ini dibuktikan dengan nilai koefisien regresi (B) sebesar 0,195 atau positif sesuai dengan hipotesis dan nilai signifikansi sebesar 0,000 dimana kurang dari  $\alpha$  yaitu 0,05. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa kualitas pengawasan badan permusyawaratan desa berpengaruh positif terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa. Dengan demikian hipotesis 3 diterima.

**d. Pengujian Hipotesis 4.**

Berdasarkan Tabel 4.10 hasil penelitian uji t menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh secara positif terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa. Hal ini dibuktikan

dengan nilai koefisien regresi (B) sebesar 0,256 atau positif sesuai dengan hipotesis dan nilai signifikansi sebesar 0,010 dimana kurang dari  $\alpha$  yaitu 0,05. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa. Dengan demikian hipotesis 4 diterima.

**e. Pengujian Hipotesis 5.**

Berdasarkan Tabel 4.10 hasil penelitian uji t menunjukkan bahwa komitmen aparatur desa tidak berpengaruh terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa. Hal ini dibuktikan dengan nilai koefisien regresi (B) sebesar -0,085 atau negatif, hal ini tidak sesuai dengan hipotesis dan nilai signifikansi sebesar 0,286 dimana jauh lebih besar dari  $\alpha$  yaitu 0,05. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa komitmen aparatur desa tidak berpengaruh positif terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa. Dengan demikian hipotesis 5 ditolak.

**f. Pengujian Hipotesis 6.**

Berdasarkan Tabel 4.10 hasil penelitian uji t menunjukkan bahwa pendamping desa berpengaruh secara positif terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa. Hal ini dibuktikan dengan nilai koefisien regresi (B) sebesar 0,337 atau positif sesuai dengan hipotesis dan nilai signifikansi sebesar 0,000 dimana kurang dari  $\alpha$  yaitu 0,05. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa pendamping

desa berpengaruh positif terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa. Dengan demikian hipotesis 6 diterima.

## 2. Uji Koefisien Determinasi (*Adjusted R<sup>2</sup>*).

Uji koefisien determinasi merupakan pengujian yang dilakukan terhadap model regresi untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Semakin tinggi nilai *R square* ( $R^2$ ) maka kemampuan variabel independen penelitian semakin tinggi berkontribusi terhadap variabel dependen.

**Tabel 4.11**  
**Hasil Penelitian (Uji Koefisien Determinasi)**  
**Model Summary**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,894 <sup>a</sup>	,799	,785	1,105

Sumber: Data primer diolah, 2018

Hasil uji determinan koefisiensi sesuai dengan Tabel 4.11 menjelaskan bahwa variabel independen penelitian berkontribusi sebesar 78,5% terhadap variabel dependen kinerja pengelolaan keuangan desa. Hal tersebut, dapat dilihat pada Tabel 4.11 bahwa nilai nilai dari *Adjusted R Square* sebesar 0,785 atau 78,5% dan 21,5% diwakili oleh variabel bebas lainnya di luar model. Penelitian terdahulu dari Munti dan Fahlevi (2017) dengan pengaruh variabel independen kapasitas aparatur desa, ketaatan pelaporan keuangan, dan kualitas pengawasan BPD memiliki kontribusi sebesar 50,07% terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa. Maka, terdapat peningkatan sebesar 28, 43% untuk penambahan variabel pemanfaatan teknologi informasi, ketaatan regulasi, komitmen aparatur

desa, dan pendamping desa serta pengurangan variabel ketaatan pelaporan keuangan.

### 3. Uji Nilai F.

Uji F atau uji simultan digunakan untuk mengetahui apakah semua variabel independen secara bersamaan atau secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen. Pengaruh tersebut dapat dilihat melalui tabel ANOVA bagian kolom F dan kolom signifikan. Variabel independen berpengaruh secara simultan apabila nilai dari F hitung lebih besar dari nilai F tabel, dimana F tabel sendiri sebesar 2,20 untuk jumlah variabel independen sebanyak 6 variabel dengan data yang diolah sebanyak 94. Nilai signifikansi harus kurang dari 0,05 sebagai level signifikansi.

**Tabel 4.12**  
**Hasil Penelitian (Uji Nilai F)**  
**ANOVA(b)**

<b>Model</b>	<b>F</b>	<b>Sig.</b>
Regression	57,681	0,000

Sumber: Data primer diolah, 2018

Berdasarkan hasil uji nilai F di atas pada Tabel 4.12 menunjukkan bahwa nilai F hitung sebesar 57,681, hal tersebut lebih besar dari F tabel dan nilai signifikansi dari hasil uji di atas menunjukkan 0,000, dimana kurang dari 0,05 yang menjadi level signifikansi. Oleh karena itu, variabel independen secara simultan berpengaruh terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa.

## **F. Pembahasan**

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bukti empiris dari faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pengelolaan keuangan desa. Sesuai dengan uji t yang dilakukan menunjukkan bahwa variabel komitmen aparatur desa tidak berpengaruh terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa sedangkan variabel kapasitas aparatur desa, ketaatan regulasi, kualitas pengawasan badan permusyawaratan desa, pemanfaatan teknologi informasi, dan pendamping desa berpengaruh terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa. Berikut pembahasan lebih lanjut mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pengelolaan keuangan desa.

### **1. Pengaruh kapasitas aparatur desa terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa.**

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis pertama pada uji t menunjukkan bahwa kapasitas aparatur desa berpengaruh positif terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa. Hal ini mengungkapkan bahwa semakin tinggi kapasitas yang dimiliki aparatur desa dalam sebuah desa maka akan berbanding lurus dengan kinerja yang dihasilkan dalam pengelolaan keuangan desa yaitu semakin bagus. Hasil penelitian ini konsisten dengan hasil penelitiannya Jalil (2017) yang menyatakan bahwa sumber daya manusia menjadi kunci keberhasilan dalam pengelolaan keuangan desa. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian dari Prasetyo dan Muis (2015) bahwa sumber daya manusia menjadi faktor krusial dalam keberhasilan pengelolaan keuangan desa.

Aparatur desa merupakan aktor utama dalam penyelenggaraan pemerintah desa, dalam hal ini aparatur desa sebagai *steward* yang memiliki kewajiban dan kewenangan terhadap pekerjaan yang diserahkan kepada mereka oleh masyarakat sebagai prinsipal. Kewenangan aparatur desa meliputi seluruh kegiatan dalam pengelolaan keuangan desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan sampai dengan pertanggungjawaban. Oleh karena itu, perlu adanya kemampuan, pemahaman, dan ketrampilan yang dimiliki oleh setiap aparatur desa. Kapasitas tersebut diperlukan agar aparatur desa dapat memberikan kinerja terbaik, sehingga tujuan dari pengelolaan keuangan desa dapat tercapai.

Penelitian dari Suryadi (2016) menghasilkan bahwa terdapat pengaruh sumber daya manusia terhadap pengelolaan keuangan desa yang disebabkan oleh riwayat pendidikan dan pelatihan. Hasil penelitian tersebut sejalan dengan pernyataan dari Rafar *et al.* (2015) bahwa pengelolaan keuangan yang baik pada sebuah instansi pemerintah membutuhkan sumber daya manusia yang berkompeten dengan latar belakang profesional di bidang akuntansi.

Hasil penelitian ini dapat dijadikan alasan pemerintah desa untuk merekrut aparatur desa yang lebih tinggi kualifikasi pendidikannya. Berdasarkan hasil penelitian ini yang dilakukan di Kecamatan Wadaslintang Kabupaten Wonosobo, aparatur desa di Kecamatan Wadaslintang rata-rata pendidikan terakhir yaitu SMA. Menurut data yang

didapatkan dari 94 responden 52,13% latar belakang pendidikan terakhir adalah SMA, sedangkan aparatur desa dengan pendidikan terakhir sarjana (S1) hanya 11,7%. Meskipun tingkat pendidikan aparatur desa rata-rata rendah akan tetapi sebagian besar mereka telah memahami pengelolaan keuangan desa dengan sangat baik. Hal tersebut ditunjang dengan rata-rata aparatur desa dengan lama bekerja di pemerintah desa lebih dari 10 tahun, 44 (46,81%) responden dari 94 total reponden sudah bekerja lebih dari 10 tahun.

## **2. Pengaruh ketaatan regulasi terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa.**

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis kedua pada uji t menunjukan bahwa ketaatan regulasi berpengaruh positif terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa. Hal ini mengungkapkan bahwa semakin tinggi pemerintah desa dalam taat atau tertib terhadap undang-undang yang berlaku mengenai pelaksanaan pengelolaan keuangan desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaba, maka kinerja pengelolaan keuangan desa akan semakin baik. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitiannya Munti dan Fahlevi (2017) yang menyatakan bahwa ketaatan pelaporan keuangan berpengaruh terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa.

Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa sesuai dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa. Isi permendagri tersebut bahwa setiap desa dalam melaksanakan pengelolaan

keuangan desa harus menggunakan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta tertib dan disiplin anggaran. Asas-asas pengelolaan keuangan desa digunakan untuk menunjang kelancaran pengelolaan keuangan desa dengan keterbukaan, keandalan, keterlibatan masyarakat sebagai prinsipal sehingga cita-cita dan hak dari masyarakat dapat terpenuhi.

Prasetyo dan Muis (2015) menjelaskan bahwa terdapat potensi permasalahan dalam pengelolaan keuangan desa yaitu laporan pertanggungjawaban yang dibuat desa tidak sesuai dengan standar dan rawan terjadinya manipulasi dan transparansi penggunaan dan pertanggungjawaban APBDesa masih rendah. Akibat dari penyelewengan keuangan desa, anggaran tidak tersalurkan sebagaimana mestinya sehingga program yang dilakukan tidak tercapai dan kebutuhan dari masyarakat tidak terpenuhi. Adanya keterbukaan dan kemampuan menerangkan dari pihak pemerintah desa mulai dari kebijakan, pelaksanaan, dan hasil dari pengelolaan keuangan kepada masyarakat desa dapat meminimalisir terjadinya penyelewengan keuangan desa.

Partisipasi dari masyarakat memberikan informasi mengenai kebutuhan dari masyarakat dan menciptakan kesepakatan mengenai APBDesa serta dilakukan pengawasan yang memberikan tercapainya kesepakatan, hal tersebut menciptakan program kerja yang sesuai dengan kebutuhan dari masyarakat. Laporan keuangan desa yang dibuat secara konsisten dan tepat waktu serta pencatatan dilakukan sesuai dengan jumlah di lapangan membantu perumusan anggaran desa periode selanjutnya

dalam pengambilan keputusan strategis dalam pengelolaan keuangan desa. Kepala desa wajib melaporkan realisasi APBDesa secara tertib yaitu setiap semesternya kepada bupati.

Permendagri No. 113 Tahun 2014 digunakan sebagai pedoman pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa. Adanya pedoman yang digunakan dapat memberikan pelaksanaan pengelolaan keuangan desa sesuai dengan yang diinginkan. Selain itu, dengan peraturan tersebut yang mengharuskan pemerintah desa untuk menjalankan pengelolaan keuangan desa dengan asas-asas yang sudah dipaparkan diatas memaksa aparaturnya untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa sebaik mungkin dan melaporkan kinerjanya sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya.

### **3. Pengaruh kualitas pengawasan badan permusyawaratan desa terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa.**

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis pertama pada uji t menunjukkan bahwa kualitas pengawasan badan permusyawaratan desa berpengaruh positif terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas pengawasan yang dilakukan oleh BPD selaku legislatif dalam pemerintah desa semakin baik maka akan berbanding lurus dengan kinerja yang dihasilkan dalam pengelolaan keuangan desa yaitu semakin baik. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitiannya Munti dan Fahlevi (2017) yang menyatakan bahwa kualitas pengawasan BPD

berpengaruh terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan pernyataan dari Prasetyo dan Muis (2015) bahwa BPD harus melakukan penguatan dalam pengawasan terhadap aparatur desa dalam mengelola keuangan desa agar pengelolaan keuangan desa tercapai dengan baik.

Badan permusyawaratan desa memiliki peranan yang penting dalam pemerintahan desa. Permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa memaparkan bahwa BPD memiliki fungsi sebagai penyalur aspirasi dari masyarakat dengan ikut membahas dan mensepakati APBDesa. Selain fungsi aspirasi yang dimiliki oleh BPD, BPD memiliki fungsi pengawas terhadap kinerja dari aparatur desa selaku penggerak roda pemerintahan. Sesuai pernyataan dari Dwipayana *et al.* (2003) bahwa BPD memiliki peran sebagai jembatan elemen masyarakat dengan pemerintah desa, dengan kata lain BPD menjadi aktor politik masyarakat yang paling dekat dan nyata dalam sebuah desa.

Pengawasan yang dilakukan oleh BPD termuat dalam UU No. 6 Tahun 2014 Pasal 61 bahwa Badan Permusyawaratan Desa memiliki hak untuk melakukan pengawasan dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan pemerintah desa kepada pemerintah desa. Fungsi pengawasan BPD membuat aparatur desa untuk lebih transparan dalam menggunakan anggaran keuangan desa, sehingga dapat meminimalisir kesalahan dalam penggunaan anggaran dan penyelewengan keuangan desa, sehingga penggunaan keuangan desa dapat bekerja tepat sasaran.

Hal ini didukung dengan penelitiannya Mondale *et al.* (2017) bahwa pengawasan BPD merupakan salah satu pendukung dan penghambat dalam proses pengelolaan keuangan desa.

#### **4. Pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa.**

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis pertama pada uji t menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa. Hal ini mengungkapkan bahwa semakin tinggi teknologi informasi yang dimanfaatkan dalam sebuah desa sebagai penunjang dalam pengelolaan keuangan desa maka akan berbanding lurus dengan kinerja yang dihasilkan dalam pengelolaan keuangan desa yaitu semakin bagus. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitiannya Nurmiati (2017) yang menyatakan teknologi informasi memiliki pengaruh terhadap peningkatan kinerja pengelolaan keuangan.

Menurut Sugiarti dan Yudianto (2017) terdapat empat alasan kenapa organisasi harus menggunakan teknologi informasi di era globalisasi sekarang ini diantaranya terjadi peningkatan kompleksitas tugas manajemen, pengaruh ekonomi globalisasi, organisasi memerlukan waktu tanggap yang lebih cepat, dan adanya tekanan dari persaingan bisnis. Teknologi Informasi selain menjadi media pemrosesan dan penyimpanan informasi seperti halnya komputer, teknologi informasi juga termasuk media komunikasi. Adanya sistem informasi yang efektif dapat

memberikan kemudahan kepada pihak internal pemerintah maupun pihak eksternal atau masyarakat sebagai prinsipal dalam mendapatkan laporan mengenai kinerja dari pengelolaan keuangan pemerintah.

Terkait dengan pengelolaan keuangan desa, teknologi informasi dapat dijadikan sebagai media untuk mempermudah dalam pengelolaan keuangan desa misalnya dalam penyusunan laporan keuangan maupun laporan pertanggungjawaban lainnya. Selain itu, teknologi informasi dapat dijadikan media dalam pengambilan informasi terkait keuangan desa oleh pemerintah daerah dan masyarakat dengan lebih mudah. Internet memberikan kemudahan dalam meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan desa dengan pembuatan laman yang menyediakan laporan keuangan desa. Adanya keterbukaan tersebut menuntut aparatur desa untuk menjalankan perannya sebagai aktor utama dalam pengelolaan keuangan bekerja dengan sebaik mungkin dan melaporkan keadaan yang sebenarnya.

Pemanfaatan internet sebagai media untuk mempermudah dalam mengakses keuangan desa tentunya membutuhkan komputernisasi yang memadai di setiap desa. Dijelaskan dalam UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa bahwa kepala desa memiliki tugas untuk memanfaatkan teknologi yang tepat guna dalam menjalankan program, prioritas, kegiatan dan kebutuhan dalam pembangunan di desa. Pemanfaatan internet sebagai media keterbukaan pemerintah dalam melaporkan keadaan keuangan desa setiap desa untuk memiliki perangkat yang memadai baik dalam

pengadaan komputer, aplikasi yang dapat digunakan dengan mudah dan akses jaringan internet. Selain itu, aparatur desa sebagai pengguna teknologi informasi harus memiliki kemampuan dalam pengoperasian teknologi informasi tersebut.

Pemanfaatan teknologi informasi dalam pemerintah desa membantu aparatur desa dalam pembuatan laporan keuangan desa lebih akuntabel dengan menggunakan komputer. Penggunaan komputer atau aplikasi dalam pembuatan laporan keuangan akan menyajikan laporan yang lebih detail dan dapat meminimalisir kesalahan penyajian. Selain itu, dengan jaringan internet yang dapat diakses dengan mudah aparatur desa dapat berbagi informasi dalam penggunaan keuangan desa kepada pihak internal desa, pemerintah daerah, dan masyarakat khususnya sehingga terciptanya transparansi pengelolaan keuangan desa. Pembuatan open data desa wonosobo juga dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dengan memberikan tanggapan mengenai penggunaan keuangan desa pada kontak yang sudah tersedia di dalam *website* tersebut.

#### **5. Pengaruh komitmen aparatur desa terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa.**

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis pertama pada uji t menunjukkan bahwa komitmen aparatur desa tidak berpengaruh terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa. Hal ini mengungkapkan bahwa tinggi rendahnya komitmen yang diberikan oleh setiap aparatur desa tidak akan

mempengaruhi kinerja dari pengelolaan keuangan desa. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan hasil penelitiannya Fitriana (2015) yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh SDM, informasi keuangan desa, dan komitmen organisasi terhadap pengelolaan keuangan desa.

Hasil penelitian dari Nasir dan Oktari (2011) bahwa keberhasilan pengelolaan keuangan pada instansi pemerintah salah satunya dipengaruhi oleh komitmen organisasi. Akan tetapi, hal tersebut tidak terdukung dalam elemen pemerintahan terkecil yaitu desa seperti hasil dari penelitian ini. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian dari Kurniawan (2011) yang dilakukan di Pemerintah Daerah Kabupaten Demak bahwa komitmen organisasi tidak berpengaruh terhadap kinerja organisasi publik.

Komitmen yang diberikan individu terhadap terlaksananya program organisasi dengan baik merupakan sebuah kewajiban yang harus dimiliki individu dalam sebuah organisasi. Hal ini didukung dengan pendapat dari Robbins dan Judge (2007), menurut mereka komitmen merupakan suatu keadaan dimana individu dalam organisasi memihak kepada organisasi dalam tercapainya tujuan organisasi dan keinginan dari individu untuk mempertahankan keanggotaannya dalam organisasi. Akan tetapi, komitmen dari aparatur desa belum cukup untuk mendapatkan kinerja yang baik dalam mengelola keuangan desa, dikarenakan komitmen merupakan hanya sebuah keinginan dipelukan adanya *action* (tindakan) dari aparatur desa sehingga pekerjaan yang dilakukan bisa tepat sasaran.

Individu menjunjung tinggi kesepakatan dan bertanggung jawab sepenuh hati, berusaha keras dalam mencapai target, bertanggung jawab dengan pekerjaan yang wajib dikerjakan, menjalankan tugas sesuai dengan aturan organisasi, berusaha untuk menyelesaikan masalah yang dibuat dimana menjadi tanggungjawabnya. Hal tersebut memerlukan dukungan dari organisasi melalui pemberian perhatian dan kepercayaan kepada setiap individu dalam menjalankan tugasnya. Selain itu, sebagai anggota dalam organisasi perlu adanya reward atas pekerjaan atau prestasi yang sudah dilaksanakannya dengan baik.

#### **6. Pengaruh pendamping desa terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa.**

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis pertama pada uji t menunjukkan bahwa pendamping desa berpengaruh positif terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa. Hal ini mengungkapkan bahwa keberadaan pendamping desa efektif dalam pelaksanaan pemerintah, pembangunan, pemberdayaan dan kemasyarakatan guna tercapainya kesejahteraan masyarakat. Pendamping desa berhasil menjalankan tugasnya dengan baik dalam memberikan bantuan secara teknis maupun dalam menstransfer ilmu kepada pemerintah desa terkait pengelolaan keuangan desa. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitiannya Jalil (2017) yang menyatakan bahwa sumber daya manusia menjadi kunci keberhasilan dalam pengelolaan keuangan desa. Penelitian ini sejalan dengan pernyataan dari Prasetyo dan Muis (2015) bahwa peran dari pendamping

desa dalam pemerintah desa terutama dalam pengelolaan keuangan desa sangat diperlukan melihat kapasitas aparatur desa yang masih lemah.

Pendamping desa menjadi fasilitator untuk pemerintah dan masyarakat desa dalam efektifitas pelaksanaan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan dan kemasyarakatan guna tercapainya kesejahteraan masyarakat desa. Melihat tugas dari pendamping desa menunjukkan bahwa pendamping desa memiliki peranan yang krusial dalam pengelolaan keuangan desa. Hal ini juga diperkuat dengan hasil penelitian dari Pahlevi (2017) bahwa kewenangan dari pendamping desa yang dilakukan di desa pugung raharjo kecamatan sekampung udik kabupaten lampung timur diantaranya kewenangan dalam hal perencanaan program-program serta alokasi dana desa, pemanfaatan atau peruntukan alokasi dana desa, pengendalian alokasi dana desa dan pengawasan alokasi dana desa.

Kewenangan yang dimiliki pendamping desa hampir disetiap proses dalam pengelolaan keuangan desa memiliki dampak yang tinggi terhadap keberhasilan pengelolaan keuangan desa. Oleh karena itu diperlukan kompetensi yang memadai dari seorang pendamping desa, hal tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 3 Tahun 2015 tentang Pendamping Desa Pasal 24, menjelaskan bahwa pendamping desa sekurang-kurangnya harus memiliki pengetahuan dan kemampuan dalam pemberdayaan masyarakat, pengalaman pengorganisasian masyarakat desa, memiliki kemampuan

mendampingi masyarakat desa dalam peningkatan usaha ekonomi desa, memahami kebiasaan, nilai budaya dan adat istiadat masyarakat desa, dan mampu memfasilitasi masyarakat desa dalam musyawarah desa.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 3 Tahun 2015 tentang Pendamping Desa Pasal 24 memaparkan bahwa tujuan pendamping desa diantaranya:

1. Meningkatkan kapasitas, efektifitas, dan akuntabilitas pemerintah desa dan pembangunan desa.
2. Meningkatkan prakarsa, kesadaran, dan partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan desa yang partisipatif.
3. Meningkatkan sinergi program pembangunan desa antar sektor.
4. Mengoptimalkan aset lokal desa secara emansipatoris.

Pemenuhan kualifikasi sebagai syarat menjadi pendamping desa merupakan sebuah kewajiban, hal tersebut menandakan bahwa setiap pendamping desa harus memiliki kualitas yang baik dalam pengelolaan keuangan desa. Selain itu, tujuan dari adanya pendamping desa menuntut pendamping desa untuk mewujudkannya melalui pengelolaan keuangan desa yang efektif.